

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai. dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran. posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Praya, 4 Februari 2024

Kepala Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah.



Drs. H. Muhamad
NIP. 196512211989031209

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala atas berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Keuangan Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2023 dalam mendukung upaya penerapan akuntabilitas dan transparansi yang terkendali.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, sehingga saran dan kritik serta masukan sangat kami harapkan untuk perbaikan laporan pada periode selanjutnya.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pejabat dan staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang telah membantu penyelesaian laporan ini.

Demikian dan terimakasih.

Praya, 4 Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. Muhamad

NIP. 196903011989031209

Daftar Isi

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	4
NERACA.....	5
LAPORAN PERASIONAL.....	7
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	
Daftar Isi.....	1
Daftar Tabel.....	2
Daftar Lampiran	3
BAB I.....	9
PENDAHULUAN.....	9
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	9
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	9
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	10
BAB II.....	11
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN	11
PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD.....	11
2.1 Kebijakan Keuangan.....	11
2.2 Pencapaian Target Kinerja.....	11
BAB III.....	14
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	14
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	14
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	15
BAB IV	16
KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	16
4.1 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan	16
4.2 Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan	16
4.3 Basis Pengukuran	16
BAB V.....	25
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	25
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	25
5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	31
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Neraca.....	35
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	37
BAB VI PENUTUP	38
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1. Pos Laporan Realisasi Pendapatan Tahun 2023	25
Tabel 2. Pos laporan realisasi pendapatan retribusi menara telekomunikasi tahun 2023	26
Tabel 3. Pos laporan realisasi pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2023	27
Tabel 4. Pos Laporan Realisasi Belanja Tahun 2023	27
Tabel 5. Pos Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023	28
Tabel 6. Pos Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya ASN Tahun 2023	29
Tabel 7. Pos Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2023	29
Tabel 8. Pos Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2023	30
Tabel 9. Pos Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023	30
Tabel 10. Pos Realisasi Belanja Modal tahun 2023	31
Table 11. Pos Pendapatan – LO 2023	32
Tabel 12. Beban Pegawai – LO 2023	32
Tabel 13. Beban Jasa – LO 2023	33
Tabel 14. Rincian Beban Jasa – LO 2023	34
Tabel 15 Beban Penyisihan – LO 2023	34
Tabel 16. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin – LO 2023	35
Tabel 17. Mutasi Aset Lancar per 31 Desember 2023	35
Tabel 18. Aset Tetap – Neraca	36
Tabel 19. Saldo Ekuitas Akhir.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Barang Habis Pakai
- Lampiran 2 : Amprah/perhitungan TPP Desember 2023
- Lampiran 3 : Amprah/Perhitungan Hutang Gaji 2023
- Lampiran 4 : SPM Pembayaran Insentif Menara Telekomunikasi 2023
- Lampiran 5 : Amprah Perhitungan Hutang Insentif Menara Telekomunikasi Triwulan IV
2023
- Lampiran 6 : Kwitansi dan Invoice Pembayaran Hosting
- Lampiran 7 : SPM dan Invoice Pembayaran Internet
- Lampiran 8 : STS Retribusi Menara Telekomunikasi 2023
- Lampiran 9 : STS Lain-lain PAD yang Sah



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,354,001,985.00	1,421,831,037.00	105.01	1,442,348,252.00
1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	
2	Pendapatan Retribusi Daerah	1,354,001,985.00	1,418,478,270.00	104.76	1,431,373,527.00
3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	3,352,767.00	-	10,974,725.00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1,354,001,985.00	1,421,831,037.00	105.01	1,442,348,252.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,354,001,985.00	1,421,831,037.00	105.01	1,442,348,252.00
	BELANJA DAERAH	6,606,108,900.00	6,467,251,211.00	97.90	4,388,896,050.00
	BELANJA OPERASI	6,282,578,952.00	6,146,317,211.00	97.83	4,129,630,050.00
1	Belanja Pegawai	2,712,897,558.00	2,687,667,936.00	99.07	2,645,811,279.00
2	Belanja Barang dan Jasa	3,569,681,394.00	3,458,649,275.00	96.89	1,483,818,771.00
3	Belanja Hibah	-	-	-	
	BELANJA MODAL	323,529,948.00	320,934,000.00	99.20	259,266,000.00
1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	306,332,747.00	303,934,000.00	84.64	259,266,000.00
3	Belanja Bangunan dan Gedung	1.00	-	-	-
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	17,197,200.00	17,000,000.00	98.85	-
	Jumlah Belanja Modal	323,529,948.00	320,934,000.00	99.20	259,266,000.00
	JUMLAH BELANJA	6,606,108,900.00	6,467,251,211.00	97.90	4,388,896,050.00
	SURPLUS/DEFISIT	(5,252,106,915.00)	(5,045,420,174.00)	96.06	(2,946,547,798.00)

Praya, 4 Februari 2024
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Lombok Tengah



Drs. R. Muhamad

NIP. 196312311989031209



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
N E R A C A
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	URAIAN	2023	2022
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
	Kas dan Setara Kas		
	Kas di Bendahara Penerimaan		
	Kas di Bendahara Pengeluaran		
	Kas di BLUD		
	Setara Kas		
	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)		
	Kas di Bendahara BOS		
	Kas lainnya		
	Piutang Pendapatan	153.932.786,00	614.074.132,00
	Piutang Pajak Daerah	-	
	Piutang Retribusi Daerah	293.247.045,00	293.247.045,00
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di pisahkan	-	-
	Piutang Lain-lain PAD	145.335.948,08	458.939.740,00
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Pendapatan	(284.650.207,00)	(138.112.652,88)
	Piutang Lainnya		
	Uang Muka Pekerjaan		
	Piutang Lain-lain Lainnya		
	Penyisihan Piutang Lainnya		
	Beban Dibayar Dimuka	279.055.333,33	248.252.666,67
	Persediaan	4.214.000,00	4.494.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	437.202.119,41	866.820.798,78
1.2	ASET TETAP		
	Tanah	1.130.500.000,00	1.130.500.000,00
	Peralatan dan Mesin	5.023.726.090,00	5.023.726.090,00
	Gedung dan Bangunan	1.108.819.250,00	1.108.819.250,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.000.000,00	5.000.000,00
	Aset Tetap Lainnya		
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
	Akumulasi Penyusutan	(4.580.283.448,82)	(303.934.000,00)
	JUMLAH ASET TETAP	2.687.761.891,61	7.571.979.340,00
1.3	ASET LAINNYA		
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
	Akum Penyusutan Kemitraan dg Pihak III		
	Aset Tidak Berwujud		
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		
	Aset Lain-lain		
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		
	JUMLAH ASET LAINNYA		
	JUMLAH ASET	3.124.964.011,02	8.438.800.139,21
2	KEWAJIBAN		
2.1	Kewajiban Jangka Pendek		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
	Utang Bunga		
	Pendapatan Diterima Dimuka		
	Utang Belanja	93.341.179,00	84.593.312,00
	Utang Transfer		
	Utang Jangka Pendek Lainnya		
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	93.341.179,00	84.593.312,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	93.341.179,00	84.593.312,00

3	EKUITAS		
	EKUITAS	3.031.622.832,02	8.354.206.828,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.124.964.011,02	8.438.800.139,21

Desa, 4 Februari 2024
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. Muhamad

NP. 19651231 198903 1 209



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	URAIAN	LO 2023	LO 2022
1	PENDAPATAN OPERASIONAL		
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.421.831.037,00	1.293.824.119,00
	Pendapatan Pajak Daerah		
	Pendapatan Retribusi Daerah	1.418.478.270,00	1.293.824.119,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	-	
	Lain - lain PAD Yang Sah	3.352.767,00	
	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
	Pendapatan Hibah -LO		
2	BEBAN DAERAH		
	BEBAN OPERASI	6.646.978.419,98	4.738.119.282,33
	Beban Pegawai	2.696.415.803,35	2.887.713.351,00
	Beban Barang dan Jasa	3.445.126.608,33	1.404.562.200,33
	Beban Bunga		
	Beban Hibah		
	Beban Bantuan Sosial		
	Beban Lain-lain		
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	358.898.454,18	465.983.731,00
	Beban Penyisihan Piutang	146.537.554,12	
	Beban Tak Terduga		
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(5.225.147.382,98)	(3.464.435.163,33)
3	SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL		
	SURPLUS NON OPERASIONAL		210.905.269,00
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek – LO		
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		210.905.269,00
	DEFISIT NON OPERASIONAL		
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5.225.147.382,98)	(3.253.529.894,33)
4	POS LUAR BIASA		
	Pendapatan Luar Biasa		
	Beban Tak Terduga		
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.225.147.382,98)	(3.253.529.894,33)

Praya, 1 Februari 2024
Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. Muhammad

NIP. 196512311989031209



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	URAIAN	2023	2022
	EKUITAS AWAL	3.524.953.833,00	3.443.129.270,38
	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(5.225.147.383,00)	(2.860.300.268,60)
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	(313.603.791,92)	(1.380.266,86)
	Koreksi Nilai Kas	-	-
	Koreksi Nilai Piutang	-	-
	Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka	-	-
	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
	Koreksi Nilai Investasi	-	(1.380.266,86)
	Koreksi Nilai Aset Lancar	(313.603.791,92)	-
	Koreksi Nilai Aset Lainnya	-	-
	Koreksi Nilai Kewajiban	-	-
	R/K PPKD	5.045.420.174,00	2.943.505.098,00
	EKUITAS AKHIR	3.031.622.832,02	3.524.953.832,92

Praya, 4 Februari 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. Muhamad

NIP. 196912311989031209

BAB I PENDAHULUAN

Laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 disusun secara tepat waktu mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca SKPD, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan SKPD yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Sedangkan Neraca SKPD merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Sementara itu, Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga menyajikan informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode tahun anggaran 2023. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai :

1. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan;
2. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai; dan
3. Perubahan posisi keuangan SKPD selama pelaksanaan APBD tahun 2023.

2.1 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD Tahun 2023, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023; dan
12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 112 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

3.1 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Tahun 2023. disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Kebijakan Keuangan. dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Kebijakan Keuangan
- 2.2 Program Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
- 5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VII Penutup

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD

2.1 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah mencakup aspek kebijakan dibidang penerimaan/pendapatan dan kebijakan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Sedangkan dibidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.2 Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah mempunyai 5 program dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program-program APBD SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki kegiatan-kegiatan antara lain:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki satu Sub Kegiatan antara lain:

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.050.000,-
- Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000,-
- Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.499.920,-
- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.299.700,-
- Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.699.920,-
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.999.900,-

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki Sub Kegiatan antara lain:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.707.983.558,-
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 4.017.415,-
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.767.479,-
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Terdapat beberapa Sub Kegiatan yang ada dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah antara lain:
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 57.522.553,-
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 100.771.900,-
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Terdapat satu Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 310.146.300,-
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan yang ada dalam Kegiatan ini adalah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 75.653.425,-
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pada kegiatan ini terdapat sub kegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 16.084.554,-
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
Program Informasi dan Komunikasi Publik memiliki kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yang antara lain adalah:
- a. Sub kegiatan layanan hubungan media dengan anggaran sebesar Rp. 2.052.781.627,-
 - b. Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 52.490.311,-
 - c. Sub kegiatan penyelenggaraan hubungan Masyarakat, media dan kemitraan komunitas dengan anggaran sebesar Rp. 31.151.700,-
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari satu kegiatan yaitu kegiatan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota. Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan antara lain:
- a. Sub kegiatan penyelenggaraan system komunikasi intra pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.010.376.012,-

- b. Sub kegiatan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 31.202.100,-
- 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki satu kegiatan yaitu kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistic sectoral dengan anggaran sebesar Rp. 117.123.426,-
- 5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi memiliki kegiatan yaitu Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 20.487.100,-

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2023 adalah Anggaran Belanja sebesar Rp. 4.702.604.097.-. Dalam mencapai target tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berupaya sekuat tenaga untuk bisa mencapai realisasi 100%. Adapaun langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja tersebut tentunya dengan mempersiapkan kertas kerja dari masing-masing program kegiatan yang ada juga dengan menyiapkan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam proses pelaksanaan program kegiatan dimaksud.

Kertas kerja masing-masing program kegiatan sudah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 dalam bentuk Rencana Anggaran Kas masing-masing sub kegiatan. Rencana Anggaran Kas ini berfungsi sebagai control atau kendali pelaksanaan program kegiatan. Sedangkan dokumen-dokumen pendukung lainnya yaitu berupa:

1. SK-SK Penanggungjawab dan Pengelola Administrasi Keuangan, yang diantaranya:
 - SK Pengguna Anggaran
 - SK Pejabat Pembuat Komitmen
 - SK Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
 - SK Pejabat Penatausahaan Keuangan
 - SK Bendahara Pengeluaran
 - SK Bendahara Penerimaan
 - SK Pengurus, Pengelola, dan Penyimpan Barang
2. SK-SK Penanggungjawab dan Pengelola Program Kegiatan, diantaranya SK PPTK dan SK-SK terkait masing-masing Program Kegiatan seperti:
 - SK Dewan Smart City (Program Kegiatan Pengelolaan E-Gov.)
 - SK Pengembangan Aplikasi (Program Kegiatan Pengembangan Aplikasi)
 - SK Penyusun Lombok Tengah Dalam Angka (Program Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral)
 - SK Pengelola Informasi Publik (Program Kegiatan Pengelolaan E-Gov.)

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target Realisasi Belanja dan Pendapatan yang tidak optimal antara lain :

1. Kendala dalam pencapaian target belanja

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah karena adanya penghematan belanja daerah. Sehingga terdapat beberapa anggaran belanja yang tidak bisa terealisasi secara penuh dan juga ada yang tidak bisa terealisasi sama sekali.

2. Kendala dalam pencapaian target pendapatan

Secara keseluruhan dalam pencapaian target realisasi pendapatan ini sudah tidak memiliki kendala yang terlalu berat. Hanya saja dalam pencapaian pendapatan ini masih belum sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan seperti terlambatnya pembayaran tagihan retribusi pada tahun berjalan sehingga muncullah denda/sanksi atas keterlambatan pembayaran yang nantinya akan menjadi piutang pendapatan pada tahun berikutnya.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

1. Asumsi Kemandirian entitas. berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan .
2. Asumsi kesinambungan entitas. berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksud untuk melakukan likuidasi.
3. Asumsi keterukuran. berarti bahwa laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan uang.

4.2 Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan Keuangan Kabupaten Lombok Tengah adalah basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*). dimana basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

1. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa :
 - a. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
2. Aset, kewajiban dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca diakui diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

4.3 Basis Pengukuran

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan SKPD ini menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan SKPD ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD ini telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

a. Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenisnya. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilakukan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto bukan jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode berjalan maupun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama dan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat pendapatan adalah Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dokumen lain yang terkait.

b. Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perendaharaan (Bendahara Umum Daerah). Belanja diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

c. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

d. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

e. Belanja Lain-lain/Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

2. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas (net aset).

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

1) Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Persediaan.

- **Kas di Bendahara Pengeluaran** adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) merupakan kas yang menjadi tanggungjawab atau yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas termasuk pajak-pajak yang telah dipungut yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca..

- **Kas di Bendahara Penerimaan** adalah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah.
- **Piutang Retribusi**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan retribusi (SKR-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal retribusi yang belum dilunasi.
- **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran** merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- **Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)** merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga perolehan untuk persediaan yang diperoleh dengan cara membeli, harga standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri, dan berdasarkan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan. Persediaan tersebut dinilai dengan menggunakan harga pembelian persediaan yang terakhir. Dokumen sumber untuk mencatat persediaan adalah laporan stock opname yang dibuat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan yang tersisa pada akhir tahun anggaran.

2) **Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen.

- **Investasi Permanen**. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan untuk mendapatkan dividen atau menenamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen Pemerintah Daerah dapat berupa Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan/atau investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dan dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Penilaian investasi dilakukan dengan metode biaya apabila kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20. antara 20 sampai 50. atau kepemilikan kurang dari 20 tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan menggunakan dan kepemilikan lebih dari 50 menggunakan metode ekuitas.

- **Investasi Non Permanen.** Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen yang dilakukan pemerintah dapat berupa dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan investasi permanen lainnya. yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi Non permanen meliputi seluruh dana pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil. anggota Koperasi. Kelompok Swadaya Masyarakat. Badan Perkreditan Rakyat. Penilaian investasi non permanen ini menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

3) Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jembatan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan masing-masing aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Tanah.** Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
- **Gedung dan Bangunan.** Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola. jika ada.

- **Jalan, Irigasi dan Jembatan.** Jalan, irigasi dan jaringan, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.
- **Peralatan dan Mesin.** Peralatan dan Mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- **Aset Tetap Lainnya.** Aset tetap lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.
- **Konstruksi Dalam Pengerjaan.** Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Nilai konstruksi yang dikerjakan kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus diayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan dan pembayaran kalim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Aset tetap dihapuskan dari neraca ketika dilepaskan dan bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk Aset Lainnya adalah antara lain Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

- **Tagihan Penjualan Angsuran.** Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari berita acara penjualan aset yang bersangkutan, yang dikeluarkan oleh Bagian Aset.
- **Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.** Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihan kepada bendahara/pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terbukti menyalahgunakan uang negara/daerah atau menghilangkan aset pemerintah/pemerintah daerah. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- **Aset Tak Berwujud.** Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian.
- **Aset Lain-lain.** Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah (aset tetap yang kondisinya rusak berat) dan aset-aset yang diserahkan kepada pihak ketiga, namun belum ada naskah hibahnya.

b. Kewajiban

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca, adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban muncul antara lain karena sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- **Kewajiban Jangka Pendek.**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi kewajiban jangka panjang ke dalam bagian lancar utang jangka pendek yang disebabkan adanya kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

c. Utang Pemotongan Pajak Pusat (PPN/PPH)

Utang Pemotongan Pajak Pusat merupakan kewajiban yang timbul akibat Bendahara Pengeluaran belum menyetorkan PPN/PPH yang dipungut dari transaksi belanja barang dan jasa

d. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang kepada Pihak ketiga merupakan kewajiban yang timbul karena pemerintah telah menerima barang atau jasa yang ada pada kontrak perjanjian namun belum dilakukan pembayaran atas barang atau jasa tersebut.

- **Kewajiban Jangka Panjang.**

Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

c. **Ekuitas Dana**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah. Ekuitas dana diklasifikasikan atas Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

- **Ekuitas dana lancar.** Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang mencerminkan kekayaan pemerintah yang bersifat lancar.
- **Ekuitas Dana Investasi.** Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- **Ekuitas Dana Cadang.** Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai peraturan perundangan.

d. Akuntansi Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

e. Transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk Barang dan Jasa

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diterima/dikeluarkan. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara garis besar telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun demikian masih terdapat hal yang masih belum sesuai dengan ketentuan dalam SAP yakni seluruh aset tetap yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Daerah selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi. hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 53, dimana Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi).

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan

Pendapatan yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan retribusi menara telekomunikasi dan Lain-lain PAD yang Sah. Realisasi pendapatan retribusi daerah dipungut dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang tarifnya ditetapkan melalui Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 tahun 2017 tentang Pajak Retribusi Menara.

Tahun 2023 pendapatan yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. 1.418.478.270,- atau 104,44%. Nilai tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.354.001.985,- Pencapaian yang melebihi target ini disebabkan karena:

- a. Target PAD retribusi menara telekomunikasi telah ditetapkan di awal, sementara selama periode penagihan ada beberapa izin pendirian menara telekomunikasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Tengah yang menurut BPK RI ketika izin pendirian menara telekomunikasi keluar maka sudah mulai dihitung sebagai tagihan retribusi.
- b. Terjalannya koordinasi yang baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Tengah terhadap izin-izin Menara telekomunikasi yang telah diterbitkan sehingga dengan segera bisa diterbitkan SKRD untuk penagihan.

Di bawah ini adalah tabel realisasi pendapatan tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah :

NO.	URAIAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI	%
1	Pendapatan Retribusi Menara Telekomunikasi	1,354,001,985.00	1,418,478,270.00	104.44
2	Lain-lain PAD yang Sah	-	3,352,767.00	0.00
	Total	1,354,001,985.00	1,421,831,037.00	104.69

Tabel 1. Pos laporan realisasi pendapatan tahun 2023

a. Pendapatan Retribusi Menara Telekomunikasi

No	NAMA PERUSAHAAN	SKRD			Jlh. Titik	Nilai	Realisasi	Tgl. Realisasi	No STS
		Nomor	Tanggal	Jatuh Tempo					
1	PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO)	974/49/DISKO MINFO/2023	13 Februari 2023	27 Maret 2023	85	365,365,615.00	365,365,615.00	04 April 2023	008/KOMINFO/STS-RETRIBUSI/2023
2	PT. KOMET INFRA NUSANTARA (KIN)	974/50/DISKO MINFO/2023	13 Februari 2023	27 Maret 2023	4	17,193,676.00	17,193,676.00	4 April 2023	009/KOMINFO/STS-RETRIBUSI/2023
3	PT. EPID MENARA ASSETCO	974/47/DISKO MINFO/2023	13 Februari 2023	27 Maret 2023	6	25,790,514.00	25,790,514.00	13 Maret 2023	003/KOMINFO/STS-RETRIBUSI/2023
4	PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA	974/48/DISKO MINFO/2023	13 Februari 2023	27 Maret 2023	8	34,387,352.00	34,387,352.00	13 Maret 2023	002/KOMINFO/STS-RETRIBUSI/2023
5	PT. SOLUSINDO KREASI PRATAMA	974/46/DISKO MINFO/2023	13 Februari 2023	27 Maret 2023	3	12,895,257.00	12,895,257.00	3 Juli 2023	014/KOMINFO/STS-RETRIBUSI/2023
6	PT. TELKOMSEL	974/52/DISKO MINFO/2023	13 Februari 2023	27 Maret 2023	1	4,298,419.00	4,298,419.00	27 maret 2023	005/KOMINFO/STS-RETRIBUSI/2023
7	PT. TOWER BERSAMA	974/45/DISKO MINFO/2023	13 Februari 2023	27 Maret 2023	35	150,444,665.00	150,444,665.00	3 Juli 2023	013/KOMINFO/STS-RETRIBUSI/2023
8	PT. XL AXIATA	974/67/DISKO MINFO/2023	20 Februari 2023	03 April 2023	1	4,298,419.00	4,298,419.00	29 maret 2023	006/KOMINFO/STS-RETRIBUSI/2023
9	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (STP)	974/65/DISKO MINFO/2023	20 Februari 2023	03 April 2023	36	154,743,084.00	154,743,084.00	13 Juni 2023	012/KOMINFO/STS-RETRIBUSI/2023
10	PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI	974/53/DISKO MINFO/2023	20 Februari 2023	03 April 2023	43	184,832,017.00	184,832,017.00	12 Mei 2023	011/KOMINFO/STS-RETRIBUSI/2023
11	PT. PERSADA SOKKA TAMA	974/64/DISKO MINFO/2023	20 Februari 2023	03 April 2023	95	408,349,805.00	408,349,805.00	10 Maret 2023	001/KOMINFO/STS-RETRIBUSI/2023
12	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	974/66/DISKO MINFO/2023	20 Februari 2023	03 April 2023	1	4,298,419.00	4,298,419.00	24 Maret 2023	004/KOMINFO/STS-RETRIBUSI/2023
13	PT. GAMETRACO TUNGGAL	974/93/DISKO MINFO/2023	6 Maret 2023	20 April 2023	4	17,193,676.00	17,193,676.00	12 Mei 2023	010/KOMINFO/STS-RETRIBUSI/2023
14	PT. INFRASYS PERSADA	974/92/DISKO MINFO/2023	6 Maret 2023	20 April 2023	3	12,895,257.00	12,895,257.00	11 Agustus 2023	016/KOMINFO/STS-RETRIBUSI/2023
15	PT. ERA BANGUN TOWERINDO	974/91/DISKO MINFO/2023	6 Maret 2023	20 April 2023	2	8,596,838.00	8,596,838.00	12 April 2023	007/KOMINFO/STS-RETRIBUSI/2023
16	PT. EDOTCO INFRASTRUKTUR INDONESIA	974/170/DISKO MINFO/2023	08 Mei 2023	22 Juni 2023	2	8,596,838.00	8,596,838.00	26 Juli 2023	015/KOMINFO/STS-RETRIBUSI/2023
17	PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA	974/220/Disko minfo/2023	15 Juni 2023	15 September 2023		4,298,419.00	4,298,419.00	8 Agustus 2023	018/KOMINFO/STS-RETRIBUSI/2023
JUMLAH REGULER					329	1,418,478,270.00	1,418,478,270.00		

Tabel 2. Pos laporan realisasi pendapatan retribusi Menara telekomunikasi tahun 2023

b. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 3.352.767,-. Nilai tersebut merupakan pendapatan atas pembayaran denda keterlambatan pembayaran retribusi tahun berjalan. Rincian pendapatan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

No	NAMA PERUSAHAAN	SKRD			Nilai	Realisasi	Tgl. Realisasi	No STS
		Nomor	Tanggal	Jatuh Tempo				
DAFTAR PIUTANG 2023								
1	PT.SOLUSI TUNAS PRATAMA	974/224/Diskominfo/2023	15 Juni 2023	15 September 2023	12,121,541.58			
					99,142,256.00			piutang 2015
2	PT.PROTELINDO	974/225/Diskominfo/2023	15 Juni 2023	15 September 2023	18,397,233.08			
					57,939,845.00			piutang 2015
3	PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA	974/219/Diskominfo/2023	15 Juni 2023	15 September 2023	1,203,557.00	1,203,557.00	3 Oktober 2023	020/KOMINFO/ST S-RETRIBUSI/2023
4	PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI	974/218/Diskominfo/2023	15 Juni 2023	15 September 2023	1,719,367.54	1,719,368.00	7 Agustus 2023	017/KOMINFO/ST S-RETRIBUSI/2023
5	PT. KOMET INFRA NUSANTARA (KIN)	974/226/Diskominfo/2023	15 Juni 2023	15 September 2023	5,587,944.30			
6	PT. TOWER BERSAMA GROUP	974/222/Diskominfo/2023	15 Juni 2023	15 September 2023	8,081,028.00			
					58,252,177.00			piutang 2015
7	PT. SOLUSINDO KREASI PRATAMA	974/223/Diskominfo/2023	15 Juni 2023	15 September 2023	257,905.00			
					35,143,690.00			piutang 2015
8	PT. TELKOMSEL	974/243/Diskominfo/2023	26 Juni 2023	26 September 2023	343,874.00	343,874.00	08 September 2023	019/KOMINFO/ST S-RETRIBUSI/2023
9	PT. XL AXIATA	974/241/Diskominfo/2023	26 Juni 2023	26 September 2023	3,266,798.32			
					170,705,773.00			piutang 2015
10	PT. GAMETRACO TUNGGAL	974/239/Diskominfo/2023	26 Juni 2023	26 September 2023	85,968.00	85,968.00	28 Agustus 2023	021/KOMINFO/ST S-RETRIBUSI/2023
					87,512,084.00			piutang 2015
12	PT. INFRASYS PERSADA	974/240/Kominfo/2023	26 Juni 2023	26 September 2023	257,906.00			
13	PT. ERA BANGUN TOWERINDO	974/242/Kominfo/2022	26 Juni 2023	26 September 2023	11,003,952.88			
14	IDA LOMBOK				190,707,602.00			piutang 2015
15	MITRA LANGGENG PERKASA				40,419,594.00			piutang 2015
JUMLAH PIUTANG					802,150,096.70	3,352,767.00		

Tabel 3. Pos laporan realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah tahun 2023

2. Belanja

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam Perubahan APBD 2023 sebesar Rp. 6.618.108.900,- dengan realisasi mencapai Rp. 6.467.251.211,- atau 97,72% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 150.857.689,-

Pos belanja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pos Belanja Operasi dan Pos Belanja Modal. Adapun Pos belanja operasi terdiri dari pos belanja pegawai dan pos belanja barang dan jasa. Rincian belanja dan realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	BELANJA	6,618,108,900.00	6,467,251,211.00	97.72	150,857,689.00
1	BELANJA OPERASI	6,294,578,952.00	6,146,317,211.00	97.64	148,261,741.00
	Belanja Pegawai	2,724,897,558.00	2,687,667,936.00	98.63	37,229,622.00
	Belanja Barang dan Jasa	3,569,681,394.00	3,458,649,275.00	96.89	111,032,119.00
2	Belanja Modal	323,529,948.00	320,934,000.00	99.20	2,595,948.00
	T O T A L	6,618,108,900.00	6,467,251,211.00	97.72	150,857,689.00

Tabel 4. Pos Laporan Realiasi Belanja tahun 2023

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional SKPD yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Anggaran belanja operasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 sebesar Rp 6.294.578.952,- dengan realisasi sebesar 97,64% atau Rp 6.146.317.211,- Adapun rincian dari belanja operasi dimaksud dapat dilihat pada table di bawah ini:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	SISA ANGGARAN 2023
5.1	BELANJA OPERASI	6,294,578,952	6,146,317,211	97.64	148,261,741
5.1.01	Belanja Pegawai	2,724,897,558	2,687,667,936	98.63	37,229,622
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,781,234,988	1,752,246,104	98.37	28,988,884
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,373,800,000	1,352,184,100	98.43	21,615,900
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	146,291,761	143,394,281	98.02	2,897,480
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	127,150,300	124,930,000	98.25	2,220,300
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	42,635,800	42,275,000	99.15	360,800
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	87,001,043	85,528,020	98.31	1,473,023
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus A	4,320,606	3,911,139	90.52	409,467
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	35,478	23,564	66.42	11,914
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	871,048,471	864,419,642	99.24	6,628,829
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	871,048,471	864,419,642	99.24	6,628,829
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	72,614,099	71,002,190	97.78	1,611,909
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	67,700,099	66,088,190	97.62	1,611,909
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4,914,000	4,914,000	100.00	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,569,681,394	3,458,649,275	96.89	111,032,119
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	574,065,194	517,408,250	90.13	56,656,944
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2,394,493,700	2,371,277,238	99.03	23,216,462
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2,016,000	1,980,000	98.21	36,000
5.1.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				
5.1.02.04.036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8,851,500	8,750,000	98.85	101,500
5.1.02.12	Belanja Kursus /Pelatihan/Sosialisasi, Bimtek				
5.1.02.12.002	Belanja Sosialisasi	216,000,000	196,900,000	91.16	19,100,000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				
5.1.02.03.02	Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor	3,500,000	3,407,120	97.35	92,880
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	370,755,000	358,926,667	96.81	11,828,333
	JUMLAH BELANJA OPERASI	6,294,578,952	6,146,317,211	97.64	148,261,741

Tabel 5. Pos Realisasi Belanja Operasi tahun 2023

Berikut penjelasan tabel 5. Pos Realisasi Belanja Operasi diatas adalah:

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan (PPNo. 21 Tahun 2004). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2023 memiliki anggaran untuk belanja pegawai antara lain terdiri dari:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya ASN

Belanja gaji dan tunjangan lainnya ASN tahun anggaran 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat dalam daftar table di bawah ini:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	SISA ANGGARAN
5.1.01	Belanja Pegawai	2,724,897,558	2,687,667,936	92,45	37,229,622
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,781,234,988	1,752,246,104	98,37	28,988,884
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,373,800,000	1,352,184,100	98,43	21,615,900
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	146,291,761	143,394,281	98,02	2,897,480
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	127,150,300	124,930,000	98,25	2,220,300
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	42,635,800	42,275,000	99,15	360,800
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	87,001,043	85,528,020	98,31	1,473,023
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4,320,606	3,911,139	90,52	409,467
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	35,478	23,564	66,42	11,914

Tabel 6. Pos Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya ASN tahun 2023

Berdasarkan tabel pos realisasi belanja gaji dan tunjangan lainnya ASN tahun 2023 di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat sisa anggaran yang cukup besar karena adanya ASN yang pindah atau ke luar ke OPD lain

2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja tambahan penghasilan ASN tahun anggaran 2023 merupakan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Berikut rinciannya dapat dilihat pada table di bawah ini:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	SISA ANGGARAN
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	871,048,471	864,419,642	99,24	6,628,829
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	871,048,471	864,419,642	99,24	6,628,829

Tabel 7. Pos Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2023

Tabel di atas menjelaskan bahwa terdapat sisa anggaran belanja tambahan penghasilan ASN disebabkan karena adanya pengurangan nilai penerimaan tambahan penghasilan ASN (TPP). Pengurangan ini merupakan hasil dari akumulasi kehadiran dan kinerja ASN.

3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN antara lain meliputi :

- Belanja atas insentif pemungutan retribusi daerah.
- Belanja Honorarium PNS

Berikut tabel realisasi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 adalah:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	SISA ANGGARAN
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	72,614,000	71,002,190	97.78	1,611,810
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	67,700,000	66,088,190	97.62	1,611,810
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4,914,000	4,914,000	100.00	-

Tabel 8. Pos Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat sisa belanja bagi ASN atas insentif pemungutan Retribusi Daerah karena pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah hanya membayar insentif pemungutan Menara telekomunikasi untuk capaian triwulan 1 (satu) dan triwulan 2 (dua).

b) Belanja Barang dan Jasa

Anggaran belanja barang dan jasa Dinas Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 3.569.681.394,-. Dari pagu tersebut yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.458.649.275,- atau 96.89%. Berikut rincian belanja barang dan jasa Dinas Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2023 adalah:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	SISA ANGGARAN
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,569,681,394	3,458,649,275	96.89	111,032,119
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	574,065,194	517,408,250	90.13	56,656,944
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2,394,493,700	2,371,277,238	99.03	23,216,462
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2,016,000	1,980,000	98.21	36,000
5.1.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				
5.1.02.04.036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8,851,500	8,750,000	98.85	101,500
5.1.02.12	Belanja Kursus /Pelatihan/Sosialisasi, Bimtek				
5.1.02.12.002	Belanja Sosialisasi	216,000,000	196,900,000	91.16	19,100,000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				
5.1.02.03.02	Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor	3,500,000	3,407,120	97.35	92,880
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	370,755,000	358,926,667	96.81	11,828,333

Tabel 9. Pos Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa:

- Realisasi belanja barang pakai habis mencapai 90.13% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 56.656.944,- disebabkan karena adanya selisih harga real di lapangan dengan harga di DPA. Disamping itu juga disebabkan karena adanya belanja yang memang dikurangi seperti belanja cetak buku statistic sectoral karena sudah beralih ke data digital pada portal Satu Data Lombok Tengah.
- Realisasi belanja sosialisasi mencapai 91.16% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 19.100.000,- disebabkan karena adanya peserta sosialisasi yang tidak hadir.

- Realisasi belanja perjalanan dinas mencapai 96.81% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 11.828.333,- disebabkan karena selisih harga real di lapangan dengan SSH di DPA seperti harga tiket pesawat dan penginapan.

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk membiayai pengadaan asset atau belanja modal lainnya. Realisasi belanja modal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 320.934.000,- atau 99,20% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 323.529.948,- Adapun belanja modal yang dimaksud adalah belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal Gedung dan bangunan, dan belanja modal asset tetap lainnya. Berikut rincian belanja modal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2023:

NO.	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI	%	SISA ANGGARAN 2023
	Belanja Modal	323,529,948	320,934,000	99.20	2,595,948
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	96,898,702	95,674,000	98.74	1,224,702
	- Belanja Modal Komputer	187,619,995	186,509,000	99.41	1,110,995
	- Belanja modal alat eksplorasi	21,814,050	21,751,000	99.71	63,050
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				-
	- Belanja modal bangunan gedung tempat kerja	1	-	0.00	1
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				-
	- Belanja modal aset tidak berwujud- lisensi dan franchise	17,197,200	17,000,000	98.85	197,200
	T O T A L	323,529,948	320,934,000	99.20	2,595,948

Tabel 10. Pos Realisasi belanja modal tahun 2023

Realisasi belanja modal tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah mencapai 99.20% dengan sisa anggaran Rp. 2.595.948,- Hal ini berarti dalam pencapaiannya tidak menemukan kendala dan permasalahan yang berarti. Sisa anggaran merupakan selisih dari harga real lapangan dengan SSH yang ada pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga dapat dilakukan efisiensi.

Berikut rincian belanja modal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023:

a.

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

1. Pendapatan - LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada tahun 2023, Pendapatan – LO Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 1.421.831.037,- seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini:

PENDAPATAN LO :	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
	(Rp)	(Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1,418,478,270.00	1,448,567,203.00
Lain-lain PAD yang Sah	3,352,767.00	167,849,097.08
Jumlah	1,421,831,037.00	1,616,416,300.08

Tabel 11. Pos Pendapatan – LO 2023

Berikut penjelasan tabel diatas adalah::

a. Pos LO - Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pos ini menggambarkan Laporan Operasional Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode tahun anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. 1.418.478.270,-

b. Pos LO – Lain-lain PAD Yang Sah

Pos LO Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2023 memiliki saldo sebesar Rp. 3.352.767,- Nilai tersebut merupakan nilai atas pendapatan terhadap penerimaan denda keterlambatan pembayaran retribusi tahun berjalan 2023.

2. Beban - LO

Beban LO merupakan beban belanja atau beban yang telah atau sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. dengan realisasi dalam tahun 2023 sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 adalah saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp 2.696.415.803,35. Beban pegawai tersebut antara lain terdiri dari:

- Beban honorarium penanggungjawab pengelola keuangan sebesar Rp. 4.914.000,-
- Beban Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp. 878.324.478,-
- Beban Gaji dan Tunjangan Lainnya ASN sebesar Rp. 1.745.477.228,-
- Beban Insentif bagi ASN atas retribusi pengendalian dan pengawasan Menara telekomunikasi sebesar Rp. Rp. 67.700.097,35

Nilai ini merupakan beban insentif retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi tahun 2023

Beban Pegawai :	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
	(Rp)	(Rp)
Beban penanggungjawab pengelola keuangan	4,914,000.00	2,645,811,279.00
Beban - Insentif bagi ASN atas retribusi pengendalian dan pengawasan Menara telekomunikasi	67,700,097.35	18,698,122.65
Beban - Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Beban Kerja	878,324,478.00	55,628,523.00
Beban - Gaji dan Tunjangan Lainnya ASN	1,745,477,228.00	10,266,666.00
Jumlah	2,696,415,803.35	2,645,811,279.00

Tabel 12. Beban Pegawai - LO

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp 3.445.126.608,33

Beban Barang dan Jasa :	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
	(Rp)	(Rp)
Beban Barang dan Jasa	3,445,126,608.33	1,469,045,237.67
Jumlah	3,445,126,608.33	1,469,045,237.67

Tabel 13. Beban Barang dan Jasa – LO

Rincian beban barang dan jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Beban barang/persediaan sebesar Rp. 517.688.250.

Beban ini merupakan beban barang pakai habis yang antara lain:

- Beban bahan bakar dan pelumas Rp. 79.734.700,-
- Beban belanja suku cadang alat angkutan Rp. 1.678.000,-
- Beban alat tulis kantor Rp. 105.074.550,-
- Beban bahan cetak Rp. 19.320.000,-
- Beban benda pos Rp. 1.000.000,-
- Beban bahan computer Rp. 23.978.000,-
- Beban bahan untuk kegiatan kantor lainnya Rp. 288.000,-
- Beban persediaan untuk diserahkan ke masyarakat Rp. 199.500.000,-
- Beban makanan dan minuman rapat Rp. 87.115.000,-

2. Beban jasa sebesar Rp. 2.565.104.571,33

Beban jasa ini terdiri dari:

- Beban Jasa Kantor Rp. 2.371.277.238,-
- Beban iuran jaminan.asuransi Rp. 1.980.000,-
- Beban sewa peralatan dan mesin Rp. 8.750.000,-
- Beban Kursus/Pelatihan Rp. 807.305.136,33

3. Beban pemeliharaan Rp. 3.407.120,- Beban ini merupakan beban atas pemeliharaan peralatan dan mesin yaitu kendaraan bermotor berpenumpang.

4. Beban perjalanan dinas Rp. 358.926.667,- Beban perjalanan dinas ini merupakan beban perjalanan dinas dalam negeri yang antara lain terdiri dari beban perjalanan dinas biasa Rp. 314.286.667 dan beban perjalanan dinas dalam kota Rp. 44.640.000,-

No.	Uraian Beban	Rp.
1	Beban Barang/Persediaan	517,688,250.00
	* Beban Barang Pakai Habis	517,688,250.00
	- Beban Bahan Bakar dan Pelumas	79,734,700.00
	- Beban Suku Cadang Alat Angkutan	1,678,000.00
	- Beban Alat tulis Kantor	105,074,550.00
	- Beban Bahan Cetak	19,320,000.00
	- Beban Benda Pos	1,000,000.00
	- Beban Bahan Komputer	23,978,000.00
	- Beban Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	288,000.00
	- Beban Persediaan Untuk Diserahkan ke Masyarakat	199,500,000.00
	- Beban Makanan dan Minuman Rapat	87,115,000.00
2	Beban Jasa	2,565,104,571.33
	* Beban Jasa Kantor	2,357,474,571.33
	- Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	2,729,435.00
	- Beban Kawat/Faximile/Internet/	807,305,136.33
	- Beban Langganan Surat Kabar/Majalah	12,725,000.00
	- Belanja Jasa Iklan	1,163,890,000.00
	- Beban jasa tenaga informasi dan teknologi	277,800,000.00
	- Beban Jasa tenaga administrasi	9,600,000.00
	- Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1,200,000.00
	- Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	82,225,000.00
	* Beban Iuran Jaminan Asuransi	1,980,000.00
	- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	879,999.00
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1,100,001.00
	* Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8,750,000.00
	- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8,750,000.00
	* Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	196,900,000.00
	- Beban Sosialisasi	196,900,000.00
3	Beban Pemeliharaan	3,407,120.00
	* Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,407,120.00
	- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3,407,120.00
4	Beban Perjalanan Dinas	358,926,667.00
	* Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	358,926,667.00
	- Beban perjalanan dinas biasa	314,286,667.00
	- Beban perjalanan dinas dalam kota	44,640,000.00
TOTAL		3,445,126,608.33

Tabel 14. Beban Jasa – LO

c. Beban Penyisihan

Beban penyisihan tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan beban penyisihan atas piutang pendapatan sebesar Rp. 146.537.554,12,- Beban penyisihan ini merupakan beban penyisihan piutang pendapatan.

Beban Penyisihan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
	(Rp)	(Rp)
- Beban penyisihan piutang pendapatan	146,537,554.12	138,112,652.88
Jumlah	146,537,554.12	138,112,652.88

Tabel 15. Beban Penyisihan – LO

d. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan saldo belanja penyusutan dan amortisasi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 358.898.454,18 dengan rincian sebagai berikut :

Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
	(Rp)	(Rp)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	358,898,454.18	437,890,122.25
- Beban Penyusutan peralatan dan mesin	335,265,197.18	414,256,865.25
- beban penyusutan gedung dan bangunan	23,508,257.00	23,508,257.00
- beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	125,000.00	125,000.00
Jumlah	358,898,454.18	437,890,122.25

Tabel 16. *Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin – LO*

3. Surplus/Defisit Non Operasional

Surplus/Defisit dari Operasional merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Rp. 0,-

5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Neraca

1. Aset

a. Aset Lancar

Aset Lancar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 437.202.119,41.- yang dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Jenis Aset Lancar	Saldo 2023	Aset Lancar		Saldo 2022
		Tambah	Kurang	
Kas dan Setara Kas				
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
- Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-
Piutang Pendapatan	153,932,786.08	153,932,786.08	614,074,132.00	614,074,132.00
- Piutang Retribusi Daerah	293,247,045.00	293,247,045.00	293,247,045.00	293,247,045.00
- Piutang Lain-lain PAD	145,335,948.08	145,335,948.08	458,939,740.00	458,939,740.00
- Penyisihan Piutang Pendapatan	(284,650,207.00)	(284,650,207.00)	(138,112,653.00)	(138,112,653.00)
Beban Dibayar Dimuka	279,055,333.33	279,055,333.33	248,252,667.00	248,252,667.00
Persediaan	4,214,000.00	4,214,000.00	4,494,000.00	4,494,000.00
Jumlah Aset Lancar	437,202,119.41	437,202,119.41	866,820,799.00	866,820,799.00

Tabel 17. *Mutasi Aset Lancar per 31 Desember 2023*

a) Piutang Pendapatan

Piutang pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 153.932.786.- Nilai tersebut didapat dari Piutang Retribusi sebesar Rp. 293.247.045,- dan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 145.335.948,08. dan pengurangan atas penyisihan piutang pendapatan sebesar Rp. 284.650.207,-

b) Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 sebesar Rp. 279.055.333,33. Nilai ini didapat atas belanja jasa kawat/faximile/internet dengan masa kontrak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Mei 2024. Belanja dimaksud adalah:

- Belanja hosting website dan lisensi GIS sebesar Rp. 17.000.000,00
- Belanja Internet sebesar Rp. 815.916.000,-

c) Persediaan

Saldo persediaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 4,214,000,-. Nilai tersebut didapat dari pencatatan sisa barang pakai habis (stock opname) selama satu periode anggaran. Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname terlampir (Lampiran)

b. Aset Tetap

Saldo Aset tetap per 31 Desember 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp 2.687.761.891,61. Nilai Aset Tetap tersebut antara lain berupa:

No.	Uraian	Saldo per 31 -12 - 2023 (Rp.)	Saldo per 31 -12 - 2022 (Rp.)
1	Tanah	1,130,500,000.00	1,130,500,000.00
2	Peralatan dan Mesin	5,023,726,090.43	5,023,726,090.43
3	Gedung dan Bangunan	1,108,819,250.00	1,108,819,250.00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5,000,000.00	5,000,000.00
5	Akumulasi Penyusutan	(4,580,283,448.82)	(4,525,318,994.64)
	J u m l a h	2,687,761,891.61	2,742,726,345.79

Tabel 18. Aset Tetap – Neraca

c. Kewajiban

Per 31 Desember 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah memiliki kewajiban yang harus disetor atau dibayarkan sebesar Rp. 93.341.179,-. Berikut rincian kewajiban yang dimaksud adalah:

- Kewajiban pembayaran kekurangan gaji berkala dan kenaikan pangkat ASN sebesar Rp. 3.497.790,-
- Kewajiban pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp. 69.533.359,-
- Kewajiban atas pembayaran insentif retribusi pengendalian dan pengawasan Menara telekomunikasi sebesar Rp. 20.310.030,-

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Saldo awal Dinas Komunikasi dan Informatika Kaupaten Lombok Tengah Tahun 2023 sebesar Rp. 3.524.953.833,- Saldo Ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp. 3.031.622.832,02.- adalah merupakan kekayaan bersih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Nilai ini merupakan selisih antara nilai asset sebesar Rp. 3.124.964.011,02 dengan nilai kewajiban sebesar Rp. 93.341.179,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel saldo ekuitas akhir di bawah ini:

No.	Uraian	Saldo per 31 -12 - 2023 (Rp.)	Saldo per 31 -12 - 2022 (Rp.)
1	Aset	3,124,964,011.02	8,438,800,138.78
	- Aset Lancar	437,202,119.41	866,820,798.78
	- Aset Tetap	2,687,761,891.61	7,571,979,340.00
	- Aset Lainnya	-	-
2	Kewajiban	93,341,179.00	84,593,312.00
	- Kewajiban jangka pendek (Utang belanja pegawai)	93,341,179.00	84,593,312.00
	Jumlah Ekuitas Akhir	3,031,622,832.02	8,354,206,826.78

Tabel 19. Saldo Ekuitas Akhir

BAB VI

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah diharapkan dapat mendukung upaya penerapan akuntabilitas dan transparansi yang terkendali. Besar rasa terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun untuk Tahun Anggaran 2023 ini.

Praya, 4 Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. Muhammad

NIP. 19651221 1989003 1 209